

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sejak dulu dikenal menjadi negara agraris dimana dominan masyarakatnya bekerja di sektor pertanian. Selain itu, sumber daya pertanian yang terdapat pada setiap provinsi di Indonesia sangat beragam karena memiliki ciri khas sendiri sehingga pertanian yang dihasilkan tidak sama. Wilayah-wilayah di Indonesia mempunyai potensi yang berbeda dalam pertumbuhan wilayah. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia seharusnya memberikan perhatian terhadap sektor yang memiliki potensi besar. Pengembangan sumber daya wilayah dari sektor pertanian harus diperhatikan pengembangannya karena bisa mengurangi kesenjangan pembangunan wilayah (Zuhdi, 2021).

Menurut (Todaro, 2011), pembangunan adalah suatu proses perubahan yang mengarah ke arah lebih baik dalam banyak sekali hal yaitu struktur ekonomi, perilaku, mental, politik dan lain-lain. Ekonomi pembangunan menurut pandangannya bisa diartikan sebagai usaha mencapai pertumbuhan taraf pendapatan perkapita (*Income Per Capita*) yang berkelanjutan agar negara bisa memperbanyak pendapatan dibandingkan laju pertumbuhan penduduk.

Pembangunan diprioritaskan untuk mendapatkan akses bagi semua masyarakat terhadap kebutuhan pangan, pekerjaan serta kebutuhan dasar lain supaya bisa hidup layak serta bermartabat secara berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan nasional harus bergerak maju dengan bertumpu pada rel ganda (*multiple track*) yaitu pro-pertumbuhan, pro-ketahanan pangan, pro-penanggulangan kemiskinan, pro-lapangan kerja, pro-ketahanan penghidupan, pro-pemerataan, serta pro-lingkungan hidup (Kementrian Pertanian, 2014).

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi bertujuan dalam memacu pemerataan pembangunan yang nantinya akan menaikkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. Dalam mengukur pembangunan ekonomi pada suatu wilayah, salah satu indikator yang umum digunakan adalah pertumbuhan ekonomi (Rahmanta, 2014).

Menurut Ernita D, dkk (2013) Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu negara dalam jangka panjang menuju keadaan yang lebih

baik selama periode tertentu dan dapat dikaitkan juga sebagai keadaan kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Terjadinya pertumbuhan ekonomi merupakan indikator keberhasilan dalam pembangunan ekonomi.

Menurut Boediono (1999) pertumbuhan ekonomi bukanlah sebuah gambaran perekonomian dalam periode waktu tertentu melainkan sebuah proses yaitu bagaimana sebuah perekonomian berkembang atau mengalami perubahan setiap waktunya. Meskipun demikian, perekonomian bisa mengalami kemunduran tingkat ekonominya apabila ada resesi ekonomi, kekacauan politik, dan kemunduran ekspor (Arief, 1995). Produk Domestik Bruto (PDB) adalah tolak ukur pertumbuhan ekonomi sebagai indikator dari perkembangan ekonomi di suatu negara. Produk Domestik Bruto (PDB) yang bertugas dalam mencatat seluruh hasil produksi/output yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu (Jamin, 1995: 153).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) Tahun 2005-2025, Pembangunan di suatu wilayah masih kerap dilakukan tanpa mengikuti pedoman rencana tata ruang sehingga saat ini tata ruang Indonesia dalam kondisi kritis karena tidak menimbang keberlanjutan dan daya lingkungan serta tidak memperhatikan kerentanan wilayah terhadap terjadinya bencana alam. Pembangunan ekonomi hingga saat ini masih jauh dari cita-cita untuk mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan seluruh masyarakat meskipun sudah menghasilkan berbagai macam kemajuan. Oleh sebab itu, perekonomian memiliki tantangan besar dalam memajukan ekonomi di 20 tahun mendatang yaitu dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan demi mewujudkan peningkatan kesejahteraan secara nyata dan mengejar ketertinggalan dari bangsa lain yang lebih maju.

Sektor pertanian di Indonesia merupakan tulang punggung dari perekonomian dan pembangunan nasional. Sektor pertanian berperan besar dalam hal pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), penerimaan devisa, penyerapan tenaga kerja, penyediaan bahan pangan untuk ketahanan pangan masyarakat, dan penyediaan bahan baku industri, serta sebagai instrumen pengentas kemiskinan.

Sektor pertanian merupakan sektor yang harus mendapatkan perhatian besar dari pemerintah dikarenakan perannya yang sangat penting dalam rangka pembangunan ekonomi jangka panjang maupun dalam rangka pemulihan ekonomi bangsa (Hidayah, et al, 2022).

Sektor pertanian dalam memenuhi peranannya terhadap perekonomian memiliki tantangan dan permasalahan yang dihadapi seperti perubahan iklim dengan frekuensi dan intensitas yang semakin tinggi sementara kemampuan mitigasi relatif rendah. Kemudian, sektor pertanian juga mengalami degradasi dan konversi lahan pertanian, rata-rata lahan pertanian yang dikuasai sangat kecil sehingga tidak memenuhi skala ekonomi, serta keengganan tenaga kerja muda turun langsung di subsistem produksi pertanian (Suryana, 2020).

Pandemi COVID-19 di Indonesia juga memberikan perubahan yang besar kepada berbagai sektor, termasuk pertanian. Pandemi COVID-19 selain berdampak pada pertumbuhan ekonomi, telah berdampak pula pada perubahan struktur ekonomi. Secara teori, perubahan struktur ekonomi menurut Todaro (1999) adalah perubahan yang menitikberatkan pada mekanisme transformasi ekonomi yang dialami oleh suatu daerah atau negara yang sedang berkembang yang semula bersifat subsistem dan menitikberatkan pada sektor pertanian menuju kepada struktur ekonomi yang modern dengan dominasi sektor industri dan jasa.

Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2020 atas dasar harga konstan (tahun dasar 2010) memiliki nilai sebesar Rp 10.723.054,80 milyar. Nilai ini menurun jika dibandingkan dengan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan pada tahun 2019 sebesar Rp. 10.949.155,4 milyar. Dampak Pandemi COVID-19 tahun 2020 memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi secara nasional mengalami kontraksi sebesar -2%. Sementara itu, pada tahun 2021 ekonomi secara nasional tumbuh positif 4%, namun pertumbuhannya melambat dibandingkan periode sebelumnya yang menyentuh di angka 5% (Badan Pusat Statistik, 2021).

Sebelum terjadinya pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi Indonesia didominasi oleh sektor industri dan jasa. Selama masa pandemi sektor pertanian menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi selain sektor informasi dan komunikasi serta konstruksi. Sektor pertanian memiliki kinerja yang relatif baik dibanding

sektor usaha lainnya yang pertumbuhannya negatif. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada 2020 tumbuh positif sebesar 1,76%. Sektor pertanian menjadi sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjadi salah satu sektor yang memiliki nilai pertumbuhan positif di tengah ekonomi nasional yang sedang mengalami kontraksi selama masa pandemi. Sementara itu, sektor lain seperti migas, industri pengolahan, dan pertambangan justru mengalami pertumbuhan negative yang selama ini menjadi sektor andalan perekonomian. Upaya mempertahankan dan meningkatkan kinerja pertanian pada masa pandemi COVID-19 merupakan hal penting mengingat peran sektor pertanian sebagai penghela pertumbuhan ekonomi nasional (Suryana, 2020).

Sektor pertanian juga berperan dalam mendorong perekonomian daerah. Pembangunan ekonomi daerah bertujuan dalam menciptakan dan membentuk institusi-institusi baru, membangun industri alternatif, memperbaiki kapasitas tenaga kerja yang ada sehingga menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, mengidentifikasi pasar baru, ahli pengetahuan dan teknologi serta mengembangkan usaha-usaha baru. Dalam pembangunan daerah yang menjadi pokok permasalahan terletak pada kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal (Subandi, 2011).

Agar tercapai tujuan pembangunan ekonomi daerah, pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama dalam mengambil inisiatif dan keputusan pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah bersama masyarakatnya, dengan dukungan sumber daya yang dimiliki harus mampu menghitung potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun ekonomi daerahnya (Subandi, 2011).

Kebijakan yang harus dilakukan pemerintah khususnya bagi pengembangan sektor pertanian adalah memaksimalkan dan mengusahakan agar prioritas pembangunan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh setiap wilayah yang bersangkutan. Apabila prioritas pembangunan wilayah kurang tepat dan sesuai dengan potensi yang dipunya, maka sumber daya yang ada kurang dimanfaatkan secara optimal. Keadaan tersebut akan mengakibatkan

meningkatnya kepincangan pembangunan daerah dan nasional secara keseluruhan (Syafrizal, 1997).

Untuk itu perlu mengidentifikasi komoditi unggulan dari setiap subsektor pertanian sebagai arahan dalam menentukan prioritas pengembangan dengan cara meningkatkan produksi, produktivitas, dan daya saing produk pertanian serta kesejahteraan petani. Sektor pertanian sangat berkontribusi dalam membangun perekonomian nasional termasuk mendorong perekonomian daerah karena sektor pertanian berperan sebagai penyedia bahan pangan, penyedia lapangan kerja, dan sumber pendapatan masyarakat dengan cara memprioritaskan pembangunan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki di wilayah tersebut.

B. Rumusan Masalah

Pada mulanya, Kabupaten Labuhanbatu merupakan Kabupaten terluas ke-2 setelah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan total luas sebesar 9.223,18 km² yang secara administratif terdiri dari 22 Kecamatan, 209 Desa dan 33 Kelurahan. Bahkan pada tahun 2003 kabupaten ini menjadi salah satu daerah kabupaten/kota dengan ekonomi terbaik se-Indonesia. Namun, pada tahun 2008, Kabupaten Labuhanbatu mengalami pemekaran wilayah yang disebabkan karena adanya masalah isu di masyarakat yang mengatakan adanya kejenuhan terhadap pemerintah. Masyarakat meminta suatu perubahan yang bisa menyentuh aspek pembangunan karena masyarakat menilai kabupaten Labuhanbatu memiliki prospek yang layak untuk dikembangkan (Lubis, 2007).

Sejak tahun 2008, Kabupaten Labuhanbatu dipecah menjadi 3 kabupaten yaitu Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dimana Kabupaten Labuhanbatu merupakan Kabupaten terluas dengan luas wilayah sebesar 2.561,38 Km² yang terbagi menjadi 9 kecamatan dan 98 desa/kelurahan. Kabupaten Labuhanbatu mempunyai kedudukan yang cukup strategis, yaitu berada pada jalur lintas timur Sumatera dan berada pada persimpangan menuju Provinsi Sumatera Barat dan Riau, yang menghubungkan pusat-pusat perkembangan wilayah di Sumatera dan Jawa serta mempunyai akses yang memadai ke luar negeri karena berbatasan langsung dengan Selat Malaka.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu ukuran kinerja pembangunan ekonomi pada tingkat wilayah (regional). Nilai yang tercantum dalam Produk Domestik Regional Bruto tersebut mencerminkan taraf hidup dan tingkat perkembangan ekonomi masyarakat. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya (Badan Pusat Statistik, 2020). Kabupaten Labuhanbatu menjadi penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ke-6 dari 25 Kabupaten di Sumatera Utara. Setelah dilakukannya pemekaran kabupaten labuhanbatu menjadi 3 kabupaten wilayah, Kabupaten Labuhanbatu memiliki nilai PDRB terbesar diantara 2 kabupaten lainnya yaitu sebesar 4,1 persen pada tahun 2021 (Lampiran 2). Pembangunan ekonomi di kabupaten Labuhanbatu tidak lepas dari sektor pertanian. Hal ini bisa dilihat dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dimana sektor pertanian merupakan sektor penyumbang terbesar kedua PDRB kabupaten Labuhanbatu setelah industri pengolahan. (Lampiran 2).

Struktur perekonomian di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2021 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama, yaitu lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 34,70 persen; lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 25,86 persen; serta lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 17,50 persen. Peranan ke tiga lapangan usaha tersebut mencapai 78,06 persen terhadap total PDRB Kabupaten Labuhanbatu. Laju pertumbuhan pada Kabupaten Labuhanbatu mengalami penurunan akibat pandemi COVID di tahun 2020. Namun pada tahun berikutnya, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Labuhanbatu meningkat dari 3,2 persen menjadi 6,3 persen pada tahun 2021 (Lampiran 3). Sebelum adanya pandemic COVID-19, laju pertumbuhan pada tahun 2019 sebesar 7,02 persen. Meskipun laju pertumbuhannya belum sebesar di tahun 2019 akan tetapi, hal itu merupakan sebuah pencapaian yang menandakan bahwa sektor Pertanian di Kabupaten Labuhanbatu mengalami peningkatan selama pandemi COVID-19.

Dari data tersebut juga memperlihatkan bahwa sektor pertanian tetap menjadi sektor unggulan terhadap perekonomian di kabupaten Labuhanbatu. Karena, sektor pertanian adalah sektor yang berpotensi besar dalam menyumbang

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pengembangan wilayah di Kabupaten Labuhanbatu. Selain itu juga, Kabupaten Labuhanbatu memiliki 9 kecamatan dengan kondisi dan karakteristik geografis yang berbeda-beda. Sehingga, memungkinkan tercipta keberagaman komoditas yang akan dihasilkan.

Menurut Badan Pusat Statistik Tahun 2022, Labuhanbatu merupakan kabupaten yang mayoritasnya menghasilkan tanaman perkebunan. Perkebunan di Labuhanbatu terdiri dari komoditi kelapa sawit, kelapa, karet, dan juga kakao. Berbeda dari subsektor pertanian lainnya, total produksi komoditi perkebunan yang dihasilkan setiap tahunnya meningkat dari tiga tahun terakhir yakni 127.661 ton pada 2019, 142.333,126 ton pada 2020, dan 144.092 ton pada 2021 (Lampiran 7). Hal ini disebabkan oleh produksi kelapa sawit yang merupakan komoditi terbesar di kabupaten Labuhanbatu. Selain itu, produksi tanaman pangan di Kabupaten Labuhanbatu mengalami penurunan yang signifikan dari tiga tahun terakhir. Pada 2019 produksi tanaman pangan yang dihasilkan oleh Kabupaten Labuhanbatu sebesar 144.857,9 ton kemudian menurun menjadi 65.178 ton pada tahun 2020 selanjutnya di tahun 2021 naik menjadi 74.328,6 ton meskipun kenaikannya tidak terlalu tinggi (Lampiran 6). Tanaman hortikultura yang terdiri dari sayuran, buah-buahan, dan juga tanaman hias selama tiga tahun terakhir ikut menurun. Dari data yang dipaparkan oleh BPS, total produksi tanaman hortikultura pada tahun 2019-2021 berturut turut sebesar 23.115 kuintal, 10121 kuintal, dan 17.063 kuintal. Populasi hewan ternak pada Kabupaten Labuhanbatu sejak 2019 hingga 2021 juga mengalami penurunan. Populasi hewan ternak dan unggas pada 2019 sebesar 938.635 ekor, pada 2020 sebanyak 663.920 ekor dan 595.894 ekor pada 2021. Penurunan ini juga diikuti oleh komoditi perikanan dan juga kehutanan yang ikut mengalami penurunan (Lampiran 8).

Dari 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu, Kecamatan Rantau Utara merupakan ibukota dari Kabupaten Labuhanbatu. Jika dilihat pada peta administratif Kabupaten Labuhanbatu, posisi Kecamatan Rantau Utara terletak lebih menjorong ke kiri sehingga Kecamatan Panai Hilir yang berada di sudut paling kanan kemungkinan mengalami ketidakmerataan dalam pembangunan dikarenakan jarak yang jauh memerlukan biaya transportasi yang lebih besar pula. Jarak menciptakan gangguan karena untuk mencapai suatu lokasi dibutuhkan

waktu dan tenaga (biaya). Kemudian, Jarak juga menimbulkan gangguan informasi sehingga semakin jauh jarak yang ditempuh dari suatu lokasi semakin kurang diketahui potensi yang terdapat pada lokasi tersebut (Tarigan, 2008).

Oleh sebab itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui apakah pembangunan daerah yang dilakukan telah sesuai dan tepat sasaran dengan potensi daerah yang dimiliki. Selain itu, diperlukan pembahasan mengenai peranan sektor pertanian terhadap perekonomian di Kabupaten Labuhanbatu karena dengan sumber daya yang terbatas, perlu difokuskan terhadap sektor-sektor yang akan membawa dampak besar kepada perekonomian secara menyeluruh dan juga agar dapat dijadikan sebagai landasan pembuatan strategi pembangunan perekonomian Kabupaten Labuhanbatu di masa mendatang dengan menjadikan pertanian sebagai sektor kunci pembangunan.

Maka dari itu, penelitian ini mengambil judul, **“Analisis peran Sektor Pertanian terhadap Perekonomian di Kabupaten Labuhanbatu”**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka timbul pertanyaan sebagai berikut.

1. Subsektor pertanian apa saja yang menjadi sektor basis di Kabupaten Labuhanbatu?
2. Subsektor pertanian basis apa yang menjadi komoditi prioritas di Kabupaten Labuhanbatu?
3. Bagaimana tingkat keterkaitan interaksi antara pusat pertumbuhan dengan daerah sekitarnya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis sektor basis pada subsektor pertanian sektor di Kabupaten Labuhanbatu.
2. Untuk menganalisis subsektor pertanian basis yang menjadi prioritas di Kabupaten Labuhanbatu
3. Untuk mengidentifikasi tingkat keterkaitan interaksi pusat pertumbuhan dengan daerah sekitarnya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Secara praktis, dapat dijadikan bahan pertimbangan dan pedoman bagi pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam mengembangkan perekonomian khususnya di Kabupaten Labuhanbatu.
2. Secara teoritis, diharapkan dapat menjadi bahan wacana dan kajian untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pembangunan terutama dalam hal potensi wilayah dengan pembangunan daerah.

